

Perempuan dan Pendidikan: Studi Historis-Kritis Dari Zaman Klasik Hingga Modern Dalam Konteks Pendidikan Islam

Listi Hani Siregar

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email: listihani31@gmail.com

Siti Juraida Hasibuan

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email: sitiJuraidahasibuan0@gmail.com

Received:

Accepted: 25-12-2025

Abstract

This article critically examines the position and role of women in education through a historical and Islamic perspective. The discussion traces the development of women's education from ancient civilizations, the pre-Islamic era, the classical Islamic period, to the modern and contemporary context. Using a qualitative library research method with a historical-critical approach, this study analyzes normative Islamic texts, historical records, and contemporary scholarly works to explore the gap between Islamic ideals and social practices regarding women's education. The findings demonstrate that women's education has strong theological legitimacy in Islam and has played a significant role in the transmission of knowledge and the development of civilization. Furthermore, the emergence of women-only educational institutions reflects adaptive strategies to expand access while responding to socio-cultural contexts. This study argues that strengthening women's education is not merely a matter of gender equality, but a strategic foundation for building an ethical, knowledgeable, and sustainable society.

Keywords: women, education, Islamic perspective, history of education, women's schools.

Abstrak: Artikel ini mengkaji secara mendalam dan kritis posisi, peran, serta dinamika pendidikan perempuan dalam lintasan sejarah panjang peradaban manusia dengan menempatkan Islam sebagai perspektif normatif dan historis. Pembahasan mencakup perkembangan pendidikan perempuan sejak masa peradaban kuno, era pra-Islam, transformasi besar pada masa Islam klasik, hingga tantangan dan peluang pendidikan perempuan di era modern dan

kontemporer. Artikel ini juga menganalisis konsep perempuan dalam Islam, peran strategis perempuan dalam pendidikan dan masyarakat, serta perkembangan institusi pendidikan dan sekolah-sekolah khusus perempuan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial, budaya, dan keagamaan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka kritis-analitis, artikel ini menegaskan bahwa pendidikan perempuan memiliki legitimasi teologis dan historis yang kuat dalam Islam serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan peradaban. Penguatan pendidikan perempuan bukan semata isu kesetaraan gender, melainkan fondasi strategis bagi pembentukan masyarakat berilmu, berkeadilan, dan berkeadaban.

Kata Kunci : Perempuan, Pendidikan, Sejarah, Islam, Sekolah Perempuan.

Pendahuluan

Pendidikan perempuan merupakan isu fundamental dalam kajian pendidikan, sejarah sosial, dan studi keislaman. Diskursus mengenai pendidikan perempuan tidak hanya berkaitan dengan persoalan akses dan kesempatan belajar, tetapi juga menyentuh dimensi ideologis, kultural, dan teologis. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan formal maupun nonformal. Secara historis, pendidikan sering kali dikonstruksikan sebagai ruang maskulin. Hal ini menyebabkan kontribusi perempuan dalam transmisi ilmu pengetahuan kurang mendapatkan pengakuan. Leila Ahmad secara tegas menyatakan bahwa “the marginalization of women in Islamic history is not rooted in the religion itself, but in the patriarchal interpretation of religious texts”.¹ Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan perempuan lebih berkaitan dengan konstruksi sosial dibandingkan dengan ajaran normatif agama. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral. Wahyu pertama menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai fondasi peradaban. Al-Qur’an secara eksplisit mengangkat derajat orang-orang berilmu tanpa membedakan jenis kelamin. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa “Islam tidak pernah membatasi pencarian ilmu berdasarkan gender, melainkan menilainya sebagai kewajiban moral dan spiritual”.² Oleh karena itu, kajian ini berupaya merekonstruksi secara kritis sejarah dan peran pendidikan perempuan dengan menempatkan Islam sebagai kerangka normatif dan analitis.

LITERATURE REVIEW AND HISTORICAL BACKGROUND

Pendidikan Perempuan pada Masa Peradaban Kuno

¹ Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven: Yale University Press.

²Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir maudhu’i*. Jakarta: Lentera Hati.

Pendidikan perempuan pada masa peradaban kuno sangat ditentukan oleh struktur sosial dan stratifikasi kelas. Di Mesir Kuno, perempuan bangsawan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, terutama dalam bidang administrasi dan keagamaan. Namun, akses tersebut tidak bersifat egaliter. H. A. R. Tilaar menegaskan bahwa “pendidikan pada masyarakat kuno lebih berfungsi sebagai instrumen pelestarian kekuasaan dibandingkan sebagai sarana pemberdayaan manusia”³. Di Yunani Kuno, pendidikan formal hampir sepenuhnya dimonopoli oleh laki-laki. Perempuan dipersiapkan untuk peran domestik dan tidak diposisikan sebagai subjek intelektual. Fatima Mernissi menyatakan bahwa “the exclusion of women from knowledge production has been a recurring pattern in patriarchal civilizations”⁴. Pernyataan ini menunjukkan bahwa marginalisasi pendidikan perempuan merupakan fenomena lintas peradaban.

Pendidikan Perempuan pada Masa Pra-Islam

Masyarakat Arab pra-Islam dikenal memiliki struktur sosial patriarkal yang kuat⁵. Pendidikan tidak terlembaga secara sistematis, dan literasi merupakan keterampilan langka. Akses perempuan terhadap pendidikan sangat terbatas dan tidak menjadi prioritas sosial. Perempuan umumnya diposisikan dalam ranah domestik dan dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam kehidupan intelektual masyarakat.

Namun demikian, tidak semua perempuan pra-Islam sepenuhnya terasing dari pengetahuan. Beberapa perempuan dari kabilah tertentu dikenal memiliki kemampuan sastra lisan⁶, khususnya dalam syair dan retorika. Meski demikian, kemampuan ini lebih bersifat individual dan tidak didukung oleh sistem pendidikan yang terstruktur. Kondisi pendidikan perempuan pada masa pra-Islam mencerminkan realitas sosial yang timpang, di mana pendidikan dipandang sebagai hak eksklusif kelompok tertentu. Situasi inilah yang kemudian mengalami transformasi signifikan seiring hadirnya Islam.

Transformasi Pendidikan Perempuan pada Masa Islam Klasik

Kehadiran Islam membawa perubahan paradigma yang mendasar dalam memandang pendidikan dan perempuan⁷. Islam menegaskan prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan serta menempatkan ilmu sebagai fondasi

³ Tilaar, H. A. R. (2015). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴ Mernissi, F. (1991). Women and Islam: An historical and theological enquiry. Oxford: Blackwell.

⁵ Nasution, H. (2012). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jakarta: UI Press.

⁶ Ahmed, L. (1992). Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate. New Haven: Yale University Press.

⁷ Rahman, F. (1982). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Chicago: University of Chicago Press.

utama kehidupan beragama dan sosial. Kewajiban menuntut ilmu berlaku universal dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Dalam sejarah Islam klasik, perempuan berperan aktif dalam proses pendidikan dan transmisi ilmu. Aisyah binti Abu Bakar merupakan salah satu contoh paling menonjol sebagai otoritas keilmuan dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Banyak sahabat dan tabi'in laki-laki belajar kepadanya, menunjukkan pengakuan terhadap otoritas intelektual perempuan⁸. Selain Aisyah, sejarah mencatat ratusan perempuan periwayat hadis yang berperan penting dalam menjaga otentisitas tradisi keilmuan Islam. Perempuan juga terlibat dalam aktivitas halaqah di masjid, madrasah, dan rumah-rumah ulama. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan Islam klasik relatif inklusif dan memberikan legitimasi kuat terhadap partisipasi perempuan.

Institusi Pendidikan Islam dan Akses Perempuan

Institusi pendidikan Islam awal, seperti masjid, kuttub, dan madrasah, berfungsi sebagai pusat pembelajaran terbuka⁹. Meskipun terdapat norma-norma sosial terkait pemisahan ruang dan etika pergaulan, perempuan tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Dalam banyak kasus, perempuan belajar secara langsung kepada ulama atau melalui sistem pembelajaran privat. Beberapa perempuan bahkan berperan sebagai pendiri dan donatur institusi pendidikan¹⁰. Kontribusi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi peserta pendidikan, tetapi juga aktor penting dalam pengembangan institusi keilmuan. Peran ini sering kali terabaikan dalam historiografi pendidikan Islam.

Konsep Perempuan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, perempuan dipandang sebagai subjek moral dan intelektual yang bertanggung jawab atas pengembangan diri dan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan dan kualitas moral, bukan oleh jenis kelamin¹¹. Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi hak perempuan atas pendidikan. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut tidak dijadikan dasar hierarki intelektual. Menurut Al-Ghazali Pendidikan dalam Islam memiliki tujuan holistik, mencakup pengembangan akal, spiritualitas, dan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan perempuan memiliki dimensi personal, sosial, dan peradaban.¹²

Al-Qur'an menyoroti perempuan sebagai individu. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan

⁸ Muhammad ibn Sa'd, 1990, *tabaqat al-kubra jilid 8* (beirut : Dar Al-kutub Al-ilmiyyah) hal. 58-62

⁹ M. Arifin, 2018. Sejarah pendidikan Islam klasik. Jakarta: Kencana. Hal. 88

¹⁰ Ahmed, L. (1992). Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate. New Haven: Yale University Press.hal. 101-103

¹¹ Abdullah Saeed, 2006, Interpreting the Qur'an , London : Roudledge. Hal 71-73

¹² Al-Attas, S. M. N. (1999). The concept of education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an memperlakukan perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah Swt dan individu perempuan dan laki-laki tersebut. Pernyataan-pernyataan Al-Qur'an tentang posisi dan kedudukan perempuan dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti perempuan adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang mempunyai kewajiban sama untuk beribadah kepada-Nya yang dijelaskan dalam (QS. al-Dzariyat : 56), perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki (QS. al-Naba' : 8), perempuan bersama dengan laki-laki juga akan mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya (QS. Maryam : 93-95), perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah Swt. untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga, sama seperti kaum pria (QS. al-Nahl : 97), Nabi Muhammad SAW, juga menegaskan bahwa kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (HR. Al-Darimy dan Abu Uwanah).

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas laki-laki. Karena hal tersebut, maka Al-Qur'an dianggap memiliki pandangan revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yaitu memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif lain, Islam lahir dengan suatu konsep hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yaitu untuk memiliki harta kekayaan sendiri, sehingga suami atau bapaknya tidak dapat mencampuri hartanya. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk berkarya dan memperoleh hasil dari hal yang sudah dikerjakan. Di bidang pendidikan, Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang bodoh. Allah Swt, sangat mengecam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam (QS. Az-Zumar : 39 ayat 9) berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَاتِلٌ أَنَا ۚ الْبَلِّ سَاءَ جِدًّا ۖ وَقَا ۖ إِنَّمَا يَخْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لَئِيَّا ۖ

Artinya: “Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena (takut) kepada azab akhirat dan mengharapakan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah “apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam justru menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengandung keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak pada perempuan sebagaimana yang diberikan pada kaum laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya.

Perkembangan Sekolah-Sekolah Khusus Perempuan

Seiring perkembangan sosial dan budaya, muncul institusi pendidikan khusus perempuan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Sekolah-sekolah ini berkembang di berbagai wilayah Muslim, terutama pada abad ke-19 dan ke-20¹³. Pada awal abad ke-20, pendidikan perempuan mulai berkembang dengan berdirinya sekolah-sekolah khusus perempuan, seperti Sekolah Kartini yang didirikan di berbagai daerah. Tokoh-tokoh seperti Tengku Agung Syarifah Latifah, Rasuna Said dan Rahmah El-Yunusiyah, juga mendirikan lembaga pendidikan untuk perempuan. Mereka percaya bahwa perempuan yang terdidik akan lebih mampu mengembangkan potensi dirinya dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat. Setelah kemerdekaan, akses pendidikan bagi perempuan mulai terbuka lebih luas, tetapi tantangan masih ada, seperti kemiskinan, budaya patriarki, yakni sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran di masyarakat, dan minimnya fasilitas di daerah terpencil.

Pemikiran pendidikan kaum perempuan di Indonesia adalah perjalanan kolektif menuju kesetaraan, yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan perempuan tanpa harus berbenturan secara langsung dengan norma sosial yang konservatif. Kehadiran sekolah khusus perempuan menjadi bentuk adaptasi sosial terhadap tuntutan modernitas sekaligus menjaga sensitivitas nilai keagamaan. Sekolah khusus perempuan tidak hanya menyediakan ruang belajar yang aman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan intelektual dan sosial. Kurikulum yang dikembangkan umumnya mengintegrasikan ilmu keagamaan dan ilmu umum, sehingga memungkinkan perempuan memiliki kompetensi akademik, spiritual, dan keterampilan hidup secara seimbang. Dalam konteks modern, sekolah-sekolah ini juga mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dan penguatan literasi digital.¹⁴

Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan

Perempuan memiliki peran strategis dalam pendidikan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Sebagai pendidik pertama dalam keluarga, perempuan

¹³ Margot Badran, 2009, *Feminism In Islam*, Oxford : Oneworld, hal. 54-56

¹⁴ Suryadi, A. (2017). Sekolah perempuan dan pemberdayaan gender. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 6(1), hal. 66-88

berperan penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan budaya literasi anak. Peran ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang. Di ranah publik, perempuan berkontribusi sebagai guru, dosen, peneliti, dan pengelola institusi pendidikan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal memperkaya perspektif keilmuan dan mendorong lahirnya pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan humanis.

Peran Perempuan dalam Pendidikan dan Peradaban

Perempuan sebagai Subjek Pendidikan

Perempuan dalam perspektif pendidikan Islam diposisikan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan atau penerima manfaat pasif. Sebagai subjek pendidikan, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan sosialnya. Pendidikan memungkinkan perempuan membangun kesadaran kritis, kemandirian berpikir, dan kapasitas kepemimpinan dalam berbagai ranah kehidupan.

Perempuan sebagai Pendidik dan Transmitor Ilmu

Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik dan transmitor ilmu pengetahuan. Perempuan tidak hanya mengajarkan ilmu dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam ruang publik keilmuan. Banyak perempuan ulama yang menjadi rujukan keilmuan, khususnya dalam bidang hadis, fikih, dan etika keislaman. Peran ini menunjukkan bahwa otoritas keilmuan dalam Islam tidak bersifat eksklusif berdasarkan jenis kelamin.

Perempuan sebagai Agen Transformasi Sosial

Pendidikan memberikan perempuan kapasitas untuk berperan sebagai agen transformasi sosial. Perempuan terdidik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, perempuan juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan advokasi keadilan sosial.

Perempuan dalam Kepemimpinan Pendidikan

Peran perempuan dalam kepemimpinan pendidikan semakin menguat di era modern. Perempuan berperan sebagai kepala sekolah, pengelola madrasah, dosen, peneliti, dan pengambil kebijakan pendidikan. Kepemimpinan perempuan dalam pendidikan cenderung menekankan pendekatan partisipatif, empatik, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara holistik.

Perempuan dan Pendidikan Keluarga

Dalam lingkup keluarga, perempuan memiliki peran fundamental sebagai pendidik pertama dan utama. Pendidikan keluarga yang diberikan oleh perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter, nilai moral, dan

budaya belajar anak. Peran ini tidak bersifat domestik semata, melainkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pendidikan formal dan pembangunan peradaban.¹⁵

Pendidikan Perempuan di Era Modern dan Kontemporer

Era modern ditandai dengan meningkatnya akses pendidikan perempuan secara global. Kebijakan afirmatif, gerakan emansipasi, dan perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi. Yang menjadikan era modern sering dipresentasikan sebagai masa keemansipasian perempuan melalui pendidikan. Secara statistik, partisipasi perempuan di pendidikan formal terutama pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan signifikan. Namun, kemajuan ini cenderung bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Pendidikan perempuan dalam sistem modern masih sering direduksi menjadi alat peningkatan angka partisipasi tanpa disertai transformasi paradigma pendidikan yang membebaskan. Dalam banyak kasus, perempuan memang “masuk sekolah”, tetapi tetap disiapkan untuk peran sosial yang subordinatif melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang melanggengkan stereotip gender¹⁶, sehingga di tingkat pendidikan tinggi, perempuan tampak mengalami kemajuan signifikan, bahkan di beberapa negara jumlah mahasiswa perempuan melampaui laki-laki.

Namun, hasil analisis kritis menunjukkan adanya ilusi kesetaraan. Perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada bidang ilmu yang secara sosial dianggap “feminin”, seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan, sementara tetap terpinggirkan dari bidang strategis seperti teknologi, sains, dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan modern belum sepenuhnya menjadi ruang netral, melainkan masih beroperasi dalam logika pasar dan budaya patriarki yang mengarahkan perempuan pada sektor dengan daya tawar sosial lebih rendah¹⁷.

Dalam konteks kontemporer, pendidikan perempuan semakin terintegrasi dengan sistem kapitalisme global. Pendidikan tidak lagi semata dimaknai sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, tetapi sebagai instrumen penciptaan tenaga kerja. Perempuan didorong untuk mengenyam pendidikan tinggi sejauh mereka kompatibel dengan kebutuhan pasar, bukan sebagai subjek intelektual otonom. Akibatnya, pendidikan perempuan kerap kehilangan dimensi kritisnya dan justru memperkuat eksploitasi baru: perempuan terdidik tetapi tetap rentan

¹⁵ Iqbal, M. (2013). *Peran perempuan dalam pendidikan keluarga*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 20(1),

¹⁶ Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, 1990, *Reproduction In Education, Society and Culture*. London : Sage Publications. Hal 72-76.

¹⁷ Sandra Harding, 1986, *The Science Question in Feminism* . Ithaca: Cornell University Press, hal. 24–28.

secara ekonomi dan sosial karena struktur kerja yang tidak adil¹⁸. Sedangkan dalam dunia Islam kontemporer, pendidikan perempuan sering berada dalam ketegangan antara legitimasi normatif agama dan praktik sosial yang membatasi. Secara teologis, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Namun, tafsir keagamaan yang konservatif sering dijadikan alat legitimasi untuk membatasi ruang intelektual perempuan. Pendidikan perempuan kemudian diarahkan bukan untuk membentuk otoritas keilmuan, tetapi untuk memperkuat peran domestik semata. Di sinilah terlihat bahwa problem utama bukan pada Islam sebagai ajaran, melainkan pada relasi kuasa dalam produksi tafsir keagamaan.¹⁹

Oleh karena itu, Perkembangan teknologi digital sering dipandang sebagai solusi baru bagi pendidikan perempuan. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan tidak otomatis bersifat emansipatoris. Ketimpangan akses teknologi, literasi digital, dan kontrol sosial berbasis gender justru menciptakan bentuk baru marginalisasi. Perempuan yang tidak memiliki akses digital memadai akan semakin tertinggal, sementara yang memiliki akses sering kali tetap berada dalam ekosistem digital yang bias gender dan sarat kontrol budaya²⁰. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan perempuan di era modern dan kontemporer belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembebasan. Pendidikan masih sering bekerja dalam kerangka struktural yang mereproduksi ketimpangan, baik melalui kurikulum, pasar kerja, maupun tafsir agama yang bias gender. Oleh karena itu, pendidikan perempuan perlu diarahkan pada paradigma transformatif, bukan sekadar integratif yakni pendidikan yang membentuk kesadaran kritis, otonomi intelektual, dan kemampuan perempuan untuk menantang struktur sosial yang tidak adil. Tanpa perubahan paradigma ini, pendidikan perempuan hanya akan melahirkan generasi terdidik secara formal tetapi tetap terkungkung secara struktural.

Analisis Kritis: Pendidikan Perempuan dan Peradaban

Pendidikan perempuan memiliki korelasi kuat dengan kemajuan peradaban²¹. Masyarakat yang mengabaikan pendidikan perempuan cenderung mengalami stagnasi sosial dan intelektual. Sebaliknya, pemberdayaan pendidikan

¹⁸ Henry A. Giroux, 2001, *Theory and Resistance in Education* South Hadley: Bergin & Garvey, hal. 91–94.

¹⁹ Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* New York: Oxford University Press, hal. 2–6.

²⁰ Manuel Castells, 2010, *The Rise of the Network Society* Oxford: Blackwell Publishers, hal. 214–218.

²¹ Mulyadi, E. (2020). Pendidikan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 133–149.

perempuan berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial.

Dalam perspektif Islam, pendidikan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan gender, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif untuk membangun peradaban berilmu dan berakhlak. Oleh karena itu, penguatan pendidikan perempuan harus menjadi agenda strategis dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Sumber data terdiri atas literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema pendidikan perempuan, sejarah pendidikan, dan pemikiran Islam. Data dikumpulkan dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, manuskrip sejarah, serta dokumen kebijakan pendidikan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan historis-kritis dan analisis isi (content analysis). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pendidikan perempuan dari masa ke masa, sedangkan analisis kritis digunakan untuk mengkaji relasi antara teks normatif Islam, praktik sosial, dan dinamika budaya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengungkap kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas pendidikan perempuan di berbagai konteks sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Perempuan dalam Lintasan Sejarah

Pendidikan Perempuan dan Historiografi Patriarkal

Salah satu persoalan utama dalam kajian pendidikan perempuan adalah dominasi historiografi patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama sejarah. Dalam banyak literatur sejarah pendidikan, kontribusi perempuan sering kali diabaikan atau diposisikan sebagai fenomena marginal. Hal ini tidak hanya mencerminkan bias penulis sejarah, tetapi juga memperkuat legitimasi struktural terhadap ketimpangan pendidikan²². Pendidikan perempuan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan akses terhadap institusi belajar, melainkan sebagai bagian dari pertarungan epistemik yang menentukan siapa yang berhak memproduksi, mendistribusikan, dan mengontrol pengetahuan. Dalam lintasan sejarah, perempuan sering kali dikeluarkan dari pusat-pusat pengetahuan bukan karena keterbatasan intelektual, tetapi karena sistem sosial yang mengonstruksi pengetahuan sebagai domain maskulin. Oleh karena itu, sejarah pendidikan perempuan sesungguhnya adalah sejarah eksklusi struktural yang dilegitimasi oleh ideologi, filsafat, agama, dan negara.²³

Analisis kritis terhadap pendidikan perempuan menuntut pembacaan yang melampaui narasi kemajuan linear. Peningkatan partisipasi pendidikan perempuan di berbagai era tidak selalu identik dengan pembebasan, sebab pendidikan juga

²² Abdullah, I. (2017). *Konstruksi dan reproduksi budaya patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²³ Gerda Lerner, 1986, *The Creation of Patriarchy* Oxford: Oxford University Press, 12.

dapat berfungsi sebagai alat domestikasi dan reproduksi ketimpangan gender. Dengan demikian, artikel ini menempatkan pendidikan perempuan sebagai arena kontestasi antara emansipasi dan kontrol sosial.

Pendidikan Perempuan dalam Peradaban Kuno

Dalam peradaban kuno, pendidikan tidak dirancang sebagai hak universal, melainkan sebagai privilese kelas. Di Mesir Kuno, perempuan dari kalangan elite memiliki akses terhadap literasi dan pengetahuan medis serta keagamaan. Namun, akses ini bersifat instrumental, yaitu untuk menopang stabilitas kekuasaan dan keberlangsungan birokrasi istana.²⁴ Pendidikan perempuan tidak dimaksudkan untuk membentuk subjek otonom, melainkan agen pendukung struktur sosial yang ada. Sementara itu, Yunani Kuno memperlihatkan paradoks besar dalam sejarah pemikiran Barat. Di satu sisi, Yunani dianggap sebagai fondasi rasionalitas dan demokrasi; di sisi lain, sistem pendidikannya bersifat eksklusif dan misoginis. Pendidikan difokuskan pada pembentukan warga negara laki-laki, sedangkan perempuan didefinisikan sebagai makhluk domestik yang tidak memiliki kapasitas deliberatif. Pandangan Aristoteles tentang inferioritas perempuan bukan sekadar opini filosofis, melainkan kerangka epistemik yang memengaruhi tradisi pendidikan Barat selama berabad-abad. Analisis kritis menunjukkan bahwa rasionalitas klasik tidak netral secara gender. Ia membangun hierarki pengetahuan yang mengaitkan akal dengan maskulinitas dan tubuh dengan feminitas, sehingga secara sistematis menyingkirkan perempuan dari ruang intelektual.

Islam dan Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Perempuan

Islam hadir dengan paradigma epistemologis yang berbeda. Konsep ilmu dalam Islam tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas moral dan intelektual manusia. Prinsip pencarian ilmu sebagai kewajiban religius berlaku universal, sebagaimana tercermin dalam praktik komunitas Muslim awal. Perempuan seperti 'Aisyah binti Abu Bakar bukan hanya pelajar, tetapi juga otoritas keilmuan yang menentukan transmisi hadis dan pemahaman agama.²⁵ Namun, sejarah Islam juga menunjukkan ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial. Seiring menguatnya institusionalisasi kekuasaan politik, pendidikan perempuan mengalami pembatasan melalui interpretasi keagamaan yang bias gender. Tafsir-tafsir patriarkal sering kali memanfaatkan dalil agama untuk membenarkan subordinasi perempuan, padahal pembatasan tersebut lebih mencerminkan budaya lokal dan kepentingan politik daripada ajaran Islam itu sendiri.²⁶

²⁴ Rosalind Miles, 2001, *Who Cooked the Last Supper?* (New York: Three Rivers Press, hal.45.

²⁵ Aisha Bewley, 1999, *Muslim Women: A Biographical Dictionary*, London: Ta-Ha Publishers, hal. 23.

²⁶ Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven: Yale University Press. hal. 91

Dari sudut pandang kritis, kemunduran pendidikan perempuan dalam dunia Islam bukan disebabkan oleh Islam sebagai sistem nilai, melainkan oleh kolonisasi makna agama oleh struktur patriarki. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan perempuan dalam konteks Islam menuntut pembacaan ulang teks keagamaan secara kontekstual dan berkeadilan gender.

Pendidikan Perempuan di Era Modern dan Kolonial

Era modern sering dipersepsikan sebagai titik balik emansipasi perempuan melalui pendidikan. Namun, analisis historis menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada masa kolonial bersifat ambivalen. Kolonialisme memperkenalkan sistem pendidikan modern, tetapi kurikulumnya dirancang untuk menghasilkan perempuan terdidik yang tetap patuh pada struktur kolonial dan domestik.²⁷ Pendidikan perempuan tidak diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis, melainkan pada reproduksi nilai-nilai kolonial dan moralitas domestik.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran R.A. Kartini mencerminkan kritik radikal terhadap sistem pendidikan yang diskriminatif. Kartini memahami pendidikan bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi sebagai sarana pembebasan kesadaran perempuan dari belenggu feodalisme dan patriarki.²⁸ Namun, warisan Kartini sering direduksi secara simbolik, sementara kritik strukturalnya terhadap sistem sosial justru diabaikan. Analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada era modern masih dibatasi oleh kepentingan politik dan ideologi dominan, sehingga emansipasi yang ditawarkan bersifat parsial.

Pendidikan Perempuan di Era Kontemporer dan Tantangannya

Di era kontemporer, perempuan secara global mengalami peningkatan signifikan dalam akses pendidikan. Namun, kesenjangan gender tetap bertahan dalam bentuk yang lebih subtil. Perempuan masih terkonsentrasi pada bidang studi tertentu, menghadapi hambatan dalam karier akademik, dan dibebani tanggung jawab domestik yang tidak proporsional.²⁹

Dalam masyarakat Muslim kontemporer, pendidikan perempuan sering terjebak dalam narasi biner antara tradisi dan modernitas. Narasi ini problematik karena mengabaikan potensi tradisi Islam sebagai sumber etika pembebasan. Pemikir Muslim feminis menunjukkan bahwa pendidikan perempuan yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika epistemologi pendidikan direkonstruksi, bukan sekadar

²⁷ Kumari Jayawardena, 1986, *Feminism and Nationalism in the Third World* (London: Zed Books, hal 57.

²⁸ R.A. Kartini, 2009, *Habis Gelap Terbitlah Terang* Jakarta: Balai Pustaka, hal. 34.

²⁹ Nelly Stromquist, 2002 *Education in a Globalized World*, Lanham: Rowman & Littlefield, hal, 114.

ditambah dengan kebijakan afirmatif.³⁰ Dengan demikian, tantangan utama pendidikan perempuan saat ini bukan lagi soal akses, melainkan transformasi struktur pengetahuan dan relasi kekuasaan dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan dan Peradaban Islam

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan fondasi utama pembentukan peradaban. Al-Qur'an dan Sunnah menempatkan ilmu sebagai pilar kemuliaan manusia tanpa pembedaan berbasis gender. Perempuan, dalam kerangka ini, memiliki posisi strategis sebagai subjek pendidikan sekaligus agen peradaban. Namun demikian, realitas sejarah umat Islam menunjukkan adanya ketegangan antara ideal normatif ajaran Islam dan praktik sosial yang sering kali membatasi akses dan peran pendidikan perempuan. Analisis kritis terhadap ketegangan ini menjadi penting untuk memahami arah peradaban Islam kontemporer.³¹

Secara normatif, Islam menegaskan prinsip kesetaraan spiritual dan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Ayat pertama yang diturunkan, *iqra'*, menandai bahwa peradaban Islam dibangun di atas perintah membaca dan belajar. Al-Qur'an tidak membatasi kewajiban menuntut ilmu hanya kepada laki-laki, melainkan menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan dan kapasitas intelektualnya. Dengan demikian, pembatasan pendidikan perempuan bertentangan dengan spirit epistemologis Islam itu sendiri.³²

Dalam sejarah Islam awal, perempuan memainkan peran sentral dalam pendidikan dan transmisi ilmu. 'Aisyah binti Abu Bakar tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai otoritas keilmuan yang menjadi rujukan para sahabat dan *tabi'in*. Kontribusinya dalam periwayatan hadis, penafsiran ayat, dan pendidikan moral umat menunjukkan bahwa perempuan berada di jantung produksi dan distribusi pengetahuan Islam. Fakta ini menegaskan bahwa eksklusi perempuan dari ruang pendidikan bukanlah tradisi Islam, melainkan produk konstruksi sosial pasca-kenabian. Selain 'Aisyah, sejarah mencatat ratusan ulama perempuan (*al-muhaddithāt*) yang berperan sebagai guru, periwayat hadis, dan pendidik di berbagai pusat peradaban Islam seperti Madinah, Baghdad, Damaskus, dan Kairo. Kehadiran mereka dalam jaringan keilmuan Islam klasik membuktikan bahwa pendidikan perempuan bukan fenomena marginal. Namun,

³⁰ Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* New York: Oxford University Press. hal 102.

³¹ Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press. hal. 33-36.

³² Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* New York: Oxford University Press. hal. 12-15.

historiografi Islam yang maskulin sering kali menyingkirkan peran mereka dari narasi besar peradaban, sehingga kontribusi perempuan tereduksi dalam ingatan kolektif umat.³³

Analisis kritis menunjukkan bahwa kemunduran peran pendidikan perempuan dalam dunia Islam lebih disebabkan oleh faktor politik, budaya, dan penafsiran agama yang bias gender. Pada masa pascaklasik, ketika otoritas keilmuan semakin terinstitusionalisasi dan dipolitisasi, ruang perempuan dalam pendidikan formal menyempit. Tafsir keagamaan yang patriarkal kemudian digunakan untuk melegitimasi pembatasan tersebut, meskipun tidak memiliki dasar kuat dalam teks-teks normatif Islam. Kondisi ini berdampak pada stagnasi intelektual dan melemahnya dinamika peradaban Islam.³⁴

Dalam konteks pendidikan, perempuan memiliki peran strategis bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai pendidik generasi. Islam memandang keluarga sebagai institusi pendidikan pertama, dan perempuan—sebagai ibu memegang peran kunci dalam pembentukan karakter, akhlak, dan orientasi intelektual anak. Pendidikan perempuan yang rendah berimplikasi langsung pada kualitas generasi Muslim secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengabaian pendidikan perempuan sejatinya merupakan pengabaian terhadap masa depan peradaban Islam.

Memasuki era modern dan kontemporer, tantangan pendidikan perempuan Muslim tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga dengan paradigma pendidikan itu sendiri. Banyak sistem pendidikan di dunia Muslim masih mereproduksi dikotomi peran domestik dan publik yang membatasi aktualisasi intelektual perempuan. Padahal, Islam tidak menegasikan peran domestik, tetapi menolak reduksi identitas perempuan hanya pada ranah tersebut. Pendidikan Islam yang transformatif harus mendorong perempuan menjadi subjek aktif dalam ranah sosial, keilmuan, dan peradaban.

Dari sudut pandang peradaban, kebangkitan umat Islam tidak mungkin terwujud tanpa revitalisasi pendidikan perempuan. Perempuan terdidik berkontribusi pada penguatan etika sosial, produksi pengetahuan, dan pembentukan masyarakat berkeadaban (*civil society*). Dengan demikian, pendidikan perempuan dalam Islam bukan sekadar isu kesetaraan gender, melainkan bagian integral dari proyek peradaban Islam yang berkeadilan, berpengetahuan, dan berkelanjutan. Kegagalan memberdayakan perempuan secara edukatif berarti mengabaikan separuh potensi umat.³⁵

Perbandingan Pendidikan Perempuan di Dunia Islam dan Barat Modern

³³ Mohammad Akram Nadwi, 2007, *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam* (Oxford: Interface Publications, hlm. 1–10).

³⁴ Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven: Yale University Press. hal. 121-130.

³⁵ Tariq Ramadan, 2009, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, hlm. 147–150).

Perkembangan pendidikan perempuan di Barat modern sering dijadikan tolok ukur kemajuan peradaban. Namun, perbandingan ini harus dilakukan secara kritis. Pendidikan perempuan di Barat berkembang melalui proses panjang yang juga diwarnai diskriminasi gender. Sementara itu, dunia Islam memiliki tradisi pendidikan perempuan yang kuat pada masa klasik, tetapi mengalami stagnasi akibat kolonialisme dan kemunduran institusi pendidikan. Dalam konteks modern, tantangan pendidikan perempuan di dunia Islam dan Barat memiliki irisan yang sama, seperti komersialisasi pendidikan dan krisis nilai. Oleh karena itu, pendidikan perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan etika dan tanggung jawab sosial.

Sekolah Khusus Perempuan sebagai Ruang Pemberdayaan

Sekolah-sekolah khusus perempuan berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan kultural. Dalam konteks masyarakat Muslim, institusi ini sering dipandang sebagai solusi kompromis antara tuntutan modernitas dan nilai-nilai tradisional. Sekolah khusus perempuan memberikan ruang aman bagi perempuan untuk mengembangkan potensi akademik dan kepemimpinan. Namun demikian, keberadaan sekolah khusus perempuan juga perlu dikaji secara kritis agar tidak memperkuat segregasi gender yang berlebihan. Tantangan utama institusi ini adalah memastikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah umum serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman.

Pendidikan Perempuan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan perempuan memiliki korelasi langsung dengan pembangunan berkelanjutan. Perempuan terdidik cenderung memiliki kesadaran kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik. Dalam perspektif Islam, pendidikan perempuan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang maslahat dan berkeadilan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan perempuan harus dipandang sebagai strategi jangka panjang pembangunan peradaban. Negara, institusi pendidikan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan akses pendidikan perempuan yang inklusif dan bermutu.

Kesimpulan

Artikel ini secara komprehensif menegaskan bahwa pendidikan perempuan merupakan isu fundamental dalam lintasan sejarah peradaban manusia dan memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Sejak masa peradaban kuno, pra-Islam, hingga Islam klasik dan era modern, posisi perempuan dalam pendidikan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan politik. Meskipun perempuan kerap mengalami marginalisasi, sejarah membuktikan bahwa mereka tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dunia pendidikan dan transmisi ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, pendidikan perempuan bukan sekadar hak sosial, melainkan kewajiban religius dan tanggung jawab peradaban. Prinsip pencarian ilmu yang bersifat

universal menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan intelektual yang setara. Ketimpangan pendidikan perempuan yang terjadi di berbagai masyarakat Muslim lebih disebabkan oleh konstruksi budaya dan penafsiran keagamaan yang tidak kontekstual, bukan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2017). *Konstruksi dan reproduksi budaya patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aisha Bewley, 1999, *Muslim Women: A Biographical Dictionary*, London: Ta-Ha Publishers.
- Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* New York: Oxford University Press
- Ahmed, L. (1992). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. New Haven: Yale University Press.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The concept of education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anwar, S. (2015). *Pendidikan perempuan dalam perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 215–232.
- Arifin, M. (2018). *Sejarah pendidikan Islam klasik*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Saeed, 2006, *Interpreting the Qur'an*, London : Roudledge
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and religious convergences*. Oxford: Oneworld.
- Gerda Lerner, 1986, *The Creation of Patriarchy* Oxford: Oxford University Press.
- Haddad, Y. Y., & Esposito, J. L. (2001). *Islam, gender, and social change*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, K. (2016). *Pendidikan dan peradaban Islam*. Jakarta: Mizan.
- Henry A. Giroux, 2001, *Theory and Resistance in Education* South Hadley: Bergin & Garvey
- Iqbal, M. (2013). Peran perempuan dalam pendidikan keluarga. Jurnal Ilmu Pendidikan, 20(1),
- Jonathan P. Berkey, 1992, *The Transmisson of Knowledge in Medievel Cairo*, Princeton : Princeton university press.
- Kumari Jayawardena, 1986, *Feminism and Nationalism in the Third World* (London: Zed Books
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Oxford: Blackwell.

- Mulyadi, E. (2020). Pendidikan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 133–149.
- Margot Badran, 2009, *Feminism In Islam*, Oxford : Oneworld.
- Manuel Castells, 2010, *The Rise of the Network Society* Oxford: Blackwell Publishers.
- Mohammad Akram Nadwi ,2007, *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam* (Oxford: Interface Publications.
- Nasution, H. (2012). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jakarta: UI Press.
- Nelly Stromquist, 2002 *Education in a Globalized World*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, 1990, *Reproduction In Education, Society and Culture*. London : Sage Publications.
- Rahman, F. (1982). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Chicago: University of Chicago Press.
- Rosalind Miles, 2001, *Who Cooked the Last Supper?* (New York: Three Rivers Press
- Shihab, M. Q. (2019). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryadi, A. (2017). Sekolah perempuan dan pemberdayaan gender. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 6(1),
- Sandra Harding, 1986, *The Science Question in Feminism* . Ithaca: Cornell University Press,
- Tilaar, H. A. R. (2015). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tariq Ramadan, 2009, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press.